



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 107/KEP/BSN/5/2016

TENTANG

PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial; Nomor: B.16.2/PSKIG/IIG.02/2/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Permohonan Penetapan SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PERTAMA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a unique, stylized representation of the name Bambang Prasetya.

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 107/KEP/BSN/5/2016

TANGGAL : 13 Mei 2016

DAFTAR PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/TS 19101-2:2016	Informasi geografis — Model referensi Bagian 2: Citra (ISO/TS 19101-2:2008, IDT)
2.	SNI ISO 19117:2016	Informasi geografis - <i>Portrayal</i> (ISO 19117:2012, IDT)
3.	SNI ISO 19118:2016	Informasi geografis — <i>Encoding</i> (ISO 19118:2011, IDT)
4.	SNI ISO 19123:2016	Informasi geografis — Skema untuk geometri dan fungsi (ISO 19123:2005, IDT)
5.	SNI ISO/TS 19130:2016	Informasi geografis - Model sensor citra untuk penentuan posisi geografis (ISO/TS 19130:2010, IDT)
6.	SNI ISO/TS 19130-2:2016	Informasi geografis — Model sensor citra untuk penentuan posisi geografis — Bagian 2:SAR, InSAR, lidar, dan sonar (ISO/TS 19130-2:2014, IDT)

7. SNI ISO 19132:2016. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
7.	SNI ISO 19132:2016	Informasi geografis – Layanan berbasis lokasi – Model acuan (ISO 19132:2007, IDT)
8.	SNI ISO 19145:2016	Informasi geografis – Register representasi lokasi titik geografis (ISO 19145:2013, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA